



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Presiden Agar Segera Teken Perpres		
Date	17 Jan 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	26	Article Size	
Journalist	Mia Chitra D	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TRANS-SUMATRA

# Presiden agar Segera Teken Perpres

JAKARTA—Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan perpres jalan tol trans-Sumatra, sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono habis tahun ini.

Mia Chitra D.  
mia.chitra@bisnis.co.id

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gapensi Soeharsojo mengkhawatirkan jika Presiden berganti, sedangkan perpres tidak segera terbit, rencana pembangunan jalan tol yang sudah mendesak itu bisa kembali molor.

"Berdasarkan hasil audiensi kami dengan kawan-kawan pengusaha jasa konstruksi, mereka sangat mendambakan jalan tol trans-Sumatra yang terintegrasi dari Aceh hingga Lampung dapat segera terwujud," ujarnya.

Pasalnya, dengan pembangunan jalan tol itu maka pembangunan infrastruktur lainnya bisa berjalan lancar, karena akses transportasi yang baik.

Selain itu dia mengatakan dengan pembangunan jalan tol itu, maka sektor konstruksi akan tumbuh baik. Pasalnya, pada saat pembangunan jalan tol tersebut, ribuan tenaga kerja bidang konstruksi, dan perusahaan jasa konstruksi anggota Gapensi akan terlibat secara aktif.

Selain itu, katanya, proyek itu juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatra dan pulau-pulau lain di sekitarnya.

"Multiplier effect dari realisasi pembangunan jalan tol ini besar sekali bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatra dan daerah lainnya. Oleh karena

► Pengusaha jasa konstruksi mendambakan keberadaan trans-Sumatra.

► Proyek sudah dilakukan kajian, sehingga tidak ada alasan menunda.

itu, kami berharap Presiden SBY segera mengeluarkan Perpres jalan tol trans-Sumatra. Jangan lagi menunda," tambahnanya.

### SIAP MENDUKUNG

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi V Nursywan Soedjono mengatakan kepastian pembangunan ruas tol itu sekarang ini ada di tangan Presiden SBY.

Pihak DPR sendiri, katanya, siap mendukung jika pemerintah segera mengeksekusi proyek tersebut.

"Pembangunan jalan tol trans-Sumatra point-nya ada di presiden. Jika pemerintah sudah mengeluarkan ide atau rencana pembangunannya, harusnya segera dieksekusi dengan cara mengeluarkan perpres," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan proyek itu juga sudah dilakukan kajian, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk menolak atau menunda perpres tersebut.

Selain itu, pembangunan proyek senilai Rp360 triliun ini juga sudah diamanatkan oleh Undang-undang APBN Perubahan 2013. Dalam UU itu disebutkan, negara memberikan penugasan kepada BUMN sebagai pengembang dan operator jalan tol trans-Sumatra.

Selain itu, proyek ini sudah beberapa kali ditenderkan, tetapi tidak ada perusahaan yang bersedia membangun. Untuk itu negara memberikan penugasan kepada BUMN untuk menjadi pengembang dan operator jalan tol tersebut. Sayangnya, justru masalah payung hukum yang kini sekarang menjadi kendalanya. ❑

### Proyek Jalan Tol Utama Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (Km)	IRR (%)	Investasi* (Rp Triliun)
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Medan-Sibolga	172	7	30
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Lampung-Palembang	358	17	44

Sumber: Kementerian PU  
Ket: \*) Perkiraan, IRR= internal rate of return